

Booklet

INDEKS

PEMBANGUNAN

MANUSIA 2021

Kabupaten Sidoarjo



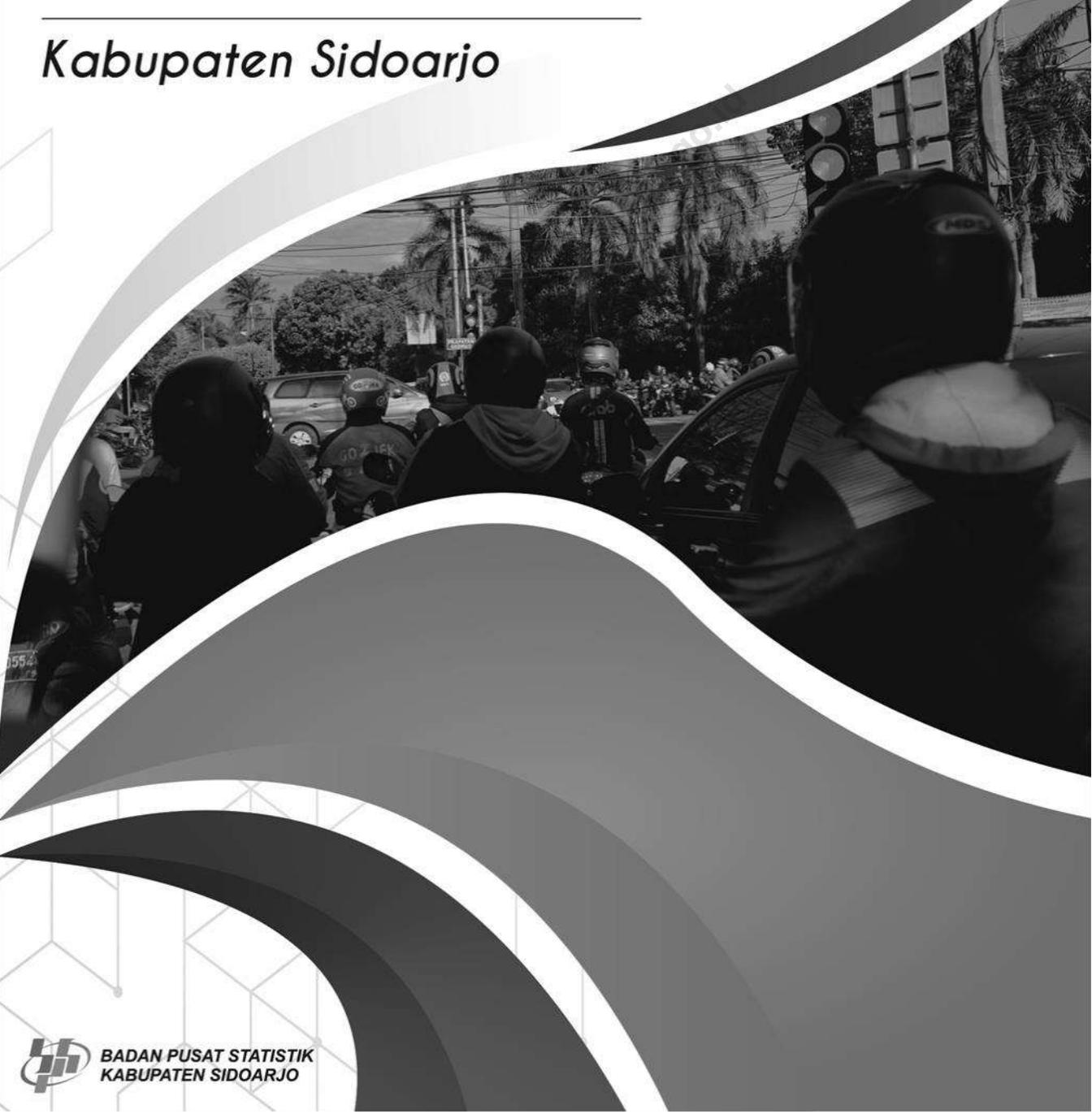
<https://sidoarjo.kab.bps.go.id>

Booklet

INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA 2020

Kabupaten Sidoarjo



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIDOARJO**

<https://sidoarjokab.bps.go.id>

**Booklet Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020**

ANALISA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2020

Nomor Katalog : 4102002.3515
Nomor Publikasi :
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 35 + ix halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Perancang Sampul :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 ini merupakan publikasi kelanjutan terbitan dari buku sejenis yang pernah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Buku ini berisikan angka IPM Tahun 2020.

Angka-angka yang disajikan dalam buku ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS dan juga data-data dari dinas instansi yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang diolah oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

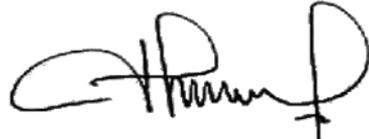
Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini dan kami juga menghargai saran maupun kritik yang bersifat membangun demi kebaikan penerbitan buku berikutnya.

Akhirnya kami berharap semoga penulisan buku ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Sidoarjo, November 2021

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Sidoarjo,



Ir. Indriya Purwaningsih, MT

NIP. 19680904 199401 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix

Bab 1. Definisi dan Pengukuran Pembangunan Manusia.....	1
1.1. Sejarah.....	1
1.2. Mendefinisikan Pembangunan Manusia.....	3
1.3. Perkembangan Metode Indeks Pembangunan Manusia.....	4
1.4. Perubahan Metodologi Penghitungan IPM.....	5
1.5. Alasan Dibalik Perubahan Metode IPM.....	7
1.6. Mengukur Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru.....	8

Bab 2. Potret Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo.....	11
2.1. Kabupaten Sidoarjo Pada Tataran Daerah.....	11
2.2. IPM Kabupaten Sidoarjo dan Komponen Penyusun.....	12
2.3. Pembangunan Manusia dan Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo di Masa Pandemi Covid-19.....	13
2.4. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Kabupaten Sidoarjo Tumbuh Melambat.....	14
2.5. Capaian Dimensi Pengetahuan Kabupaten Sidoarjo Meningkat.....	15
2.6. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Turun Terdampak Pandemi.....	16

DAFTAR ISI

Bab 3. Perkembangan Akses Terhadap Kebutuhan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Layak)	19
3.1. Perkembangan Akses Bidang Pendidikan.....	19
3.2. Perkembangan Akses Bidang Kesehatan.....	20
3.3. Perkembangan Akses Standar Hidup Layak.....	25
Lampiran	28

<https://sidoarjokab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Rata-Rata Aritmatik dan Geometrik.....8

Tabel 2. APS Kabupaten Sidoarjo, 2016-2020.....19

Tabel 3. Angka Kesakitan Kabupaten Sidoarjo 2019-2020.....20

<https://sidoarjo.jokab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia UNDP.....	6
Gambar 2. IPM Kabupaten Sidoarjo dan Pertumbuhannya.....	13
Gambar 3. Grafik UHH dan Pertumbuhannya, 2015-2020.....	14
Gambar 4. Grafik RLS dan Pertumbuhannya, 2015-2020.....	15
Gambar 5. Grafik HLS dan Pertumbuhannya, 2015-2020.....	16
Gambar 6. Grafik Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhannya.....	17
Gambar 7. Angka Kesakitan Kabupaten Sidoarjo 2019-2020.....	22
Gambar 8. Indikator Kesehatan Terkait Perilaku Kesehatan Tahun 2020.....	23
Gambar 9. Indikator Kesehatan Terkait Lingkungan Tahun 2020.....	24
Gambar 10. Garis Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2020.....	25
Gambar 11. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2020.....	26
Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020.....	27



BAB 1
DEFINISI DAN PENGUKURAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA

<http://jurnal.oyabbps.go.id>

1

Definisi dan Pengukuran Pembangunan Manusia

1.1. Sejarah

Sebelum tahun 1990, dunia seolah melupakan arti pentingnya manusia dalam diskusi-diskusi tentang pembangunan ekonomi. Perhatian dunia tertuju pada diskusi tentang pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Pada saat itu, diskusi tentang pembangunan manusia hanya sebatas tentang modal manusia. Artinya, manusia hanya dipandang sebagai input dan juga alat dalam pembangunan.

Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran utama yang sangat penting dalam pembangunan sebelum tahun 1990. Namun, kedua indikator tersebut belum menjelaskan fakta bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, angka pendapatan nasional memang bermanfaat untuk banyak tujuan tetapi tidak mengungkapkan komposisi penduduk atau penerima manfaat nyata. Kedua, penilaian kinerja yang hanya mendasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut. Aspek penting tersebut diantaranya adalah akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi kerja yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.

Menjelang tahun 1990, perhatian dunia berubah dari pembangunan ekonomi menjadi pembangunan manusia. Dunia internasional mulai menyadari bahwa manusia

merupakan input sekaligus menjadi tujuan dalam pembangunan. Hal ini muncul karena beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga disertai dengan tingginya pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia.

Tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) menerbitkan laporan untuk menanggapi isu yang sedang berkembang pada saat itu. Dalam laporan yang berjudul Human Development Report (HDR) 1990, UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Laporan HDR edisi pertama tersebut secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus menjadi input pembangunan.

Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP memberikan nuansa baru dalam memahami pembangunan. Cara pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain:

- Pertumbuhan PDB merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan PDB saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun PDB atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi, atau sebaliknya.
- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Keduanya hanya berfokus dengan sisi penawaran, dimana manusia dipandang sebagai alat untuk memajukan produksi komoditas. Hal ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat karena manusia adalah agen aktif dari kegiatan produksi. Akan tetapi, manusia memiliki nilai lebih dari barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.

- Pendekatan kesejahteraan masyarakat memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai peserta di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.
- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia

1.2. Mendefinisikan Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia memiliki arti yang luas. Terdapat banyak ahli yang mengemukakan konsep pembangunan manusia. Amartya Sen (1989) menjelaskan bahwa pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan bergantung pada factor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Selain itu, Mahbub ul Haq (1995) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan, yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Sementara itu, dalam *human development report 1990, United Nation Development Programme* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses memperbesar pilihan masyarakat. Salah satu aspek yang paling kritis adalah panjang umur dan kehidupan yang sehat, berpendidikan, dan menikmati kehidupan yang layak. Penambahan pilihan termasuk kebebasan politik, jaminan hak asasi manusia (HAM), dan harga diri. Adam Smith menyebut hal tersebut sebagai kemampuan untuk bergaul dengan orang lain tanpa “malu tampil di depan umum”. Pembangunan manusia memiliki dua sisi yang saling mendukung, yaitu pembentukan kapasitas manusia dan pemanfaatannya. Pembentukan kapabilitas manusia mencakup upaya peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sedangkan pemanfaatannya mencakup penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Kedua sisi tersebut idealnya terbangun secara

seimbang agar capaian pembangunan manusia menjadi optimum dan berkesinambungan.

1.3. Perkembangan Metode Indeks Pembangunan Manusia

UNDP menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen kunci untuk mengukur dan memantau perkembangan manusia, yaitu:

- **Umur Panjang**
Pentingnya harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang itu sendiri berharga dan pada kenyataan bahwa sebagai manfaat tidak langsung (seperti gizi yang cukup dan Kesehatan yang baik) terkait erat dengan harapan hidup yang lebih tinggi.
- **Pengetahuan**
Angka melek huruf hanyalah cerminan kasar dari akses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan untuk kehidupan produktif dalam masyarakat modern. Namun literasi merupakan langkah awal seseorang dalam belajar dan membangun pengetahuan, sehingga angka literasi sangat penting dalam setiap pengukuran perkembangan manusia. Dalam rangkaian indikator yang lebih bervariasi, kepentingan juga harus dilampirkan pada keluaran dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi untuk pengembangan dasar manusia, literasi layak mendapat penekanan yang paling jelas.
- **Menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak**
Merupakan indikator yang mungkin sulit diukur secara sederhana karena membutuhkan data tentang akses ke tanah, kredit, pendapatan dan sumber daya lainnya. Namun, data-data tentang variabel tersebut terbilang langka. Indikator pendapatan yang tersedia adalah pendapatan per kapita, dimana memiliki cakupan nasional yang luas yang dapat menggambarkan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Sejak tahun 2014 angka IPM di Indonesia disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM secara periodik menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia di daerahnya, baik capaian, kecepatan, posisi, maupun disparitas antardaerah. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

sangat tinggi	: $IPM \geq 80$
tinggi	: $70 \leq IPM < 80$
sedang	: $60 \leq IPM < 70$
rendah	: $IPM < 60$

Manfaat lain dari IPM adalah sebagai salah satu indikator target pembangunan dan salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai salah satu indikator dalam pengalokasian DID.

1.4. Perubahan Metodologi Perhitungan IPM

Pada HDR 1990 diperkenalkan tiga dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut diwakili dengan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan metode rata-rata aritmatik.

Satu tahun setelahnya, 1991, UNDP mengganti komponen IPM menjadi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Namun, pada tahun 1995 UNDP Kembali melakukan penyempurnaan dengan

mengganti komponen IPM menjadi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam penghitungan IPM dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama tetapi merubah indikator yang digunakan, yaitu: agregasi Angka Melek Huruf (AMH) dan kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi agregasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain perubahan pada indikator, UNDP juga merubah penghitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik, sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Selanjutnya, penyempurnaan oleh UNDP dilanjutkan pada tahun 2011 dengan melakukan penggantian tahun dasar PNB per kapita dari tahun dasar 2008 menjadi 2005. Kemudian dilanjutkan 3 tahun berikutnya, yaitu tahun 2014 dengan mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi tahun 2011 dan merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. IPM metode baru yang disempurnakan pada tahun 2014 memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya adalah:

1. Menggunakan rata-rata geometrik yang tidak serta merta dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimensi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik diperlukan keseimbangan antardimensi yang sama;
2. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik
 - Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya;
 - Penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah;

Gambar 1. Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia UNDP



Sumber: Badan Pusat Statistik

1.5. Alasan Dibalik Perubahan Metode IPM

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan bahwa suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar.

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi dijadikan indikator perkembangan pendidikan karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar negara sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarnegara dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, indikator yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indeks komposit menjadi tidak relevan, sehingga indikator AMH perlu diganti dengan indikator lain yang representatif. Indikator berikutnya yang diganti adalah PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang turut menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri dalam penghitungan. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan

kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Kedua, sebelum tahun 2010, penggunaan rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menyebabkan capaian yang rendah di suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sedangkan, penggunaan rata-rata geometrik lebih responsive dengan adanya ketimpangan capaian pembangunan. Jika terdapat satu indikator yang rendah, maka indikator tersebut tidak akan tertutupi oleh indikator lain yang memiliki nilai yang tinggi. Selain itu, penggunaan rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah (BPS, 2015), sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik. Sementara itu, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan.

Misalkan:

Tabel 1. Perbandingan Rata-Rata Aritmatik dan Geometrik

Pendidikan	Kesehatan	Pengeluaran	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	5	5	5	5
4	5	6	5	4,93
3	5	7	5	4,72

Dari hasil contoh penghitungan tersebut, terlihat kelemahan dari rata-rata aritmatik, dimana rata-rata aritmatik tidak mampu melihat adanya ketimpangan capaian dimensi pembangunan manusia. Sehingga terlihat pada kolom 4 bahwa ada tidaknya ketimpangan, maka nilai IPM tetap sama. Sebaliknya, penggunaan rata-rata geometrik lebih peka terhadap adanya ketimpangan capaian dimensi pembangunan manusia.

1.6. Mengukur Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru

Penyempurnaan dan perubahan metodologi penghitungan IPM dari tahun ke tahun sejatinya bertujuan agar indikator yang digunakan untuk penghitungan IPM tepat dan relevan. Selain itu, dengan adanya perubahan metodologi penghitungan IPM dari rata-rata aritmatik menjadi geometrik agar dapat menangkap adanya ketimpangan capaian dimensi pembangunan manusia.

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}}$$

Keterangan:

$I_{kesehatan}$: Indeks Kesehatan

UHH : Umur Harapan Hidup

UHH_{min} : Umur Harapan Hidup
Minimum

UHH_{maks} : Umur Harapan
Hidup Maksimum

Dimensi Pendidikan

$$I_{hls} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

I_{hls} : Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} : Harapan Lama Sekolah
Minimum

HLS_{maks} : Harapan Lama Sekolah
Maksimum

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{max} - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}$$

$I_{pengeluaran}$: Indeks Pengeluaran

$\ln(\text{pengeluaran})$: Pengeluaran Perkapita (Ribu/Tahun)

$\ln(\text{pengeluaran})_{min}$: Pengeluaran Perkapita (Ribu/Tahun) minimum

$\text{Pengeluaran}_{maks}$: Pengeluaran Perkapita (Ribu/Tahun) maksimum

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$



BAB 2
POTRET PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABUPATEN SIDOARJO

<http://planning.kabupsidoarjo.go.id>

2

Potret Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo

Pandemi covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia memberikan dampak berkelanjutan bagi perekonomian negara. Pandemi covid-19 menyebabkan pemerintah menerapkan berbagai pembatasan mobilitas, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas banyak industri, menurunnya daya beli masyarakat, dan menurunnya minat investor. Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa Lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan dunia akan berkontraksi dalam kisaran 3,4 - 4,3 persen. Negara Indonesia juga tidak terlepas dari kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen.

2.1. Kabupaten Sidoarjo Pada Tataran Daerah

IPM merupakan indikator yang dapat menggambarkan sejauh mana pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Sidoarjo. Indikator tersebut secara berkala dirilis oleh BPS di setiap tahunnya. Pada tahun 2021, indeks pembangunan manusia Kabupaten Sidoarjo mencapai 80,65. Dengan capaian ini, maka IPM Kabupaten Sidoarjo masih berada pada level sangat tinggi (berada pada kisaran $IPM > 80$). Nilai IPM Kabupaten Sidoarjo menjadi yang tertinggi ke empat di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Madiun. Selain itu, nilai IPM Kabupaten Sidoarjo juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur, dimana IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 72,14.

2.2. IPM Kabupaten Sidoarjo dan Komponen Penyusun

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Dalam kurun waktu 1990 hingga sekarang, terdapat beberapa penyempurnaan dan perubahan metodologi penghitungan IPM oleh BPS. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Pada tahun 2021, IPM kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar 80,65. Sementara itu, Umur harapan hidup saat lahir (UHH) Sidoarjo sebesar 74,06 yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2020 diperkirakan dapat bertahan hidup selama 74,06 tahun. UHH Sidoarjo pada tahun 2021 melebihi UHH Jawa Timur, yaitu sebesar 71,38.

Dari sisi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) masyarakat kabupaten Sidoarjo sebesar 14,94 tahun, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun kabupaten Sidoarjo yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,94 tahun atau setara dengan Diploma III.

Selain itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 10,72 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sidoarjo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,72 tahun atau selesai menamatkan kelas X SMA.

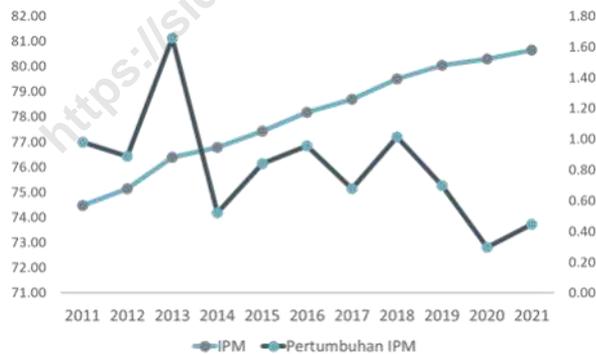
Sementara itu, dari sisi ekonomi, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 adalah Rp 14.578.000. Artinya pendapatan tiap penduduk Kabupaten Sidoarjo secara rata-rata sudah mencapai Rp 14.578.000 per tahun.

2.3. Pembangunan Manusia dan Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo di Masa Pandemi Covid-19.

Adanya pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap indikator ekonomi dan sosial. Jika dilihat secara tren, dalam kurun waktu 2011 hingga 2021, IPM Kabupaten Sidoarjo memiliki tren meningkat. Namun, jika dilihat dari pertumbuhannya, dalam kurun waktu 2011 hingga 2021 pertumbuhan IPM Kabupaten Sidoarjo secara umum memiliki tren menurun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 1,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan IPM di masa pandemi covid-19 ini dipengaruhi oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

Gambar 2. IPM Kabupaten Sidoarjo dan Pertumbuhannya Tahun 2011—2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

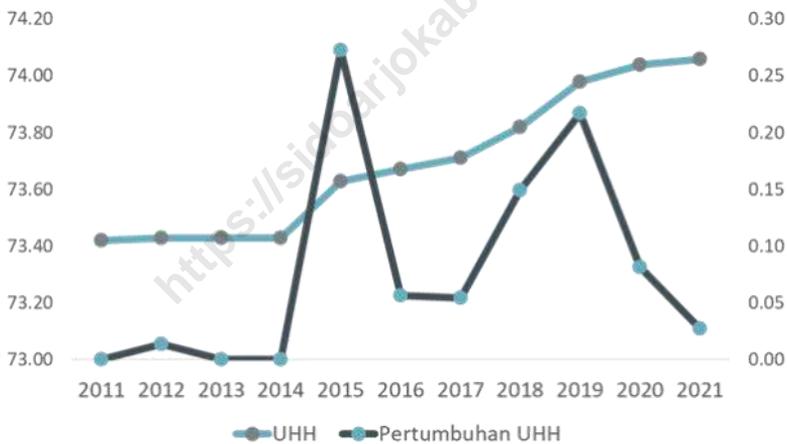
2.4. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Kabupaten Sidoarjo Tumbuh Melambat

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Kabupaten Sidoarjo yang digambarkan oleh capaian umur harapan hidup (UHH) menunjukkan tren yang positif

dari tahun ke tahun. Pada Gambar 3 dibawah terlihat bahwa terjadi tren peningkatan UHH Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 sebesar 73,67 tahun menjadi 74,06 tahun di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Sidoarjo semakin baik dari tahun ke tahun.

UHH dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Sidoarjo mencapai 74,06 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup selama 74,06 tahun. Nilai ini meningkat sebesar 0,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun terlihat terjadi peningkatan UHH Kabupaten Sidoarjo, namun secara pertumbuhan dapat dilihat pada gambar dibawah bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan UHH dibanding dengan dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 UHH Kabupaten Sidoarjo berhasil tumbuh sebesar 0,22 persen dan pada tahun 2020 berhasil tumbuh sebesar 0,08 persen.

Gambar 3. Grafik UHH dan Pertumbuhannya, 2011—2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

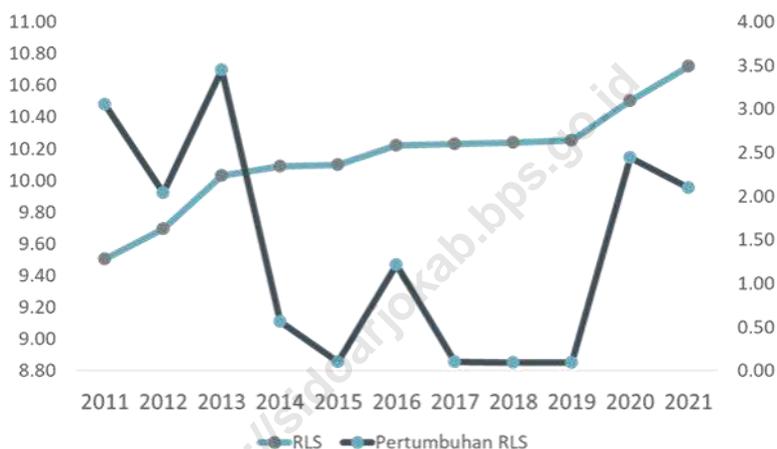
2.5. Capaian Dimensi Pengetahuan Kabupaten Sidoarjo Meningkat

Dimensi pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang digambarkan oleh capaian rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Pada grafik dibawah terlihat bahwa terjadi tren peningkatan RLS dari tahun 2016 yang sebesar 10,22 menjadi 10,72 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di

Kabupaten Sidoarjo semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, RLS juga menunjukkan indikator output pembangunan pada jangka Panjang.

Pada tahun 2021, nilai RLS Kabupaten Sidoarjo adalah 10,72, yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk Sidoarjo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,72 tahun atau setara dengan SMA kelas 1. Nilai ini meningkat sebesar 2,10persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan RLS pada tahun 2021 juga menjadi yang tertinggi kedua selama 5 tahun terakhir,

Gambar 4. Grafik RLS dan Pertumbuhannya, 2011—2021



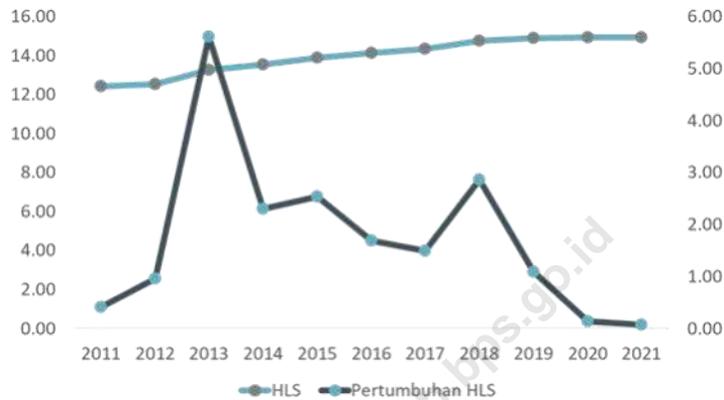
Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, dimensi pengetahuan juga dapat digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). Berbeda dengan RLS, HLS merupakan indikator yang dapat menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan pada jangka pendek. Selama kurun waktu 2016 hingga 2021, terlihat bahwa HLS Kabupaten Sidoarjo mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2021, HLS Kabupaten Sidoarjo mencapai 14,94 tahun yang menunjukkan bahwa anak-anak Sidoarjo yang berusia 7 tahun yang masuk pada jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,94 tahun atau setara diploma III

Walaupun terlihat nilai HLS Kabupaten Sidoarjo meningkat dari tahun ke tahun, namun secara pertumbuhan mengalami perlambatan. Berdasarkan grafik dibawah

terlihat bahwa pertumbuhan HLS Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2018 mengalami tren penurunan. HLS Kabupaten Sidoarjo di tahun 2021 tercatat hanya sebesar 0,07 persen, dimana nilai ini lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 5. Grafik HLS dan Pertumbuhannya, 2011—2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.6. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Turun Terdampak Pandemi

Dimensi standar hidup layak digambarkan oleh indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Berdasarkan grafik dibawah, terlihat dari kurun waktu 2016 hingga 2021, secara umum pengeluaran per kapita Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar Rp 14.578.000 per tahun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 14.458.000 per tahun. Kondisi tersebut sebagai penanda terjadinya pemulihan ekonomi di kabupaten Sidoarjo. Beberapa perusahaan mulai beroperasi kembali memicu peningkatan produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi tersebut secara umum dapat diasumsikan sebagai peningkatan penghasilan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Jika dilihat dari pertumbuhannya, secara umum pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Sidoarjo mengalami tren

fluktuasi pada periode 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 hingga 2019 masing-masing tumbuh sebesar 3,43 persen; 2,93 persen; 3,34 persen; dan 3,11. Sedangkan pada tahun 2021, tercatat pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Sidoarjo tumbuh positif sebesar 0,83 persen.

Gambar 6. Grafik Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhannya, 2011—2021



Sumber: Badan

● Pengeluaran Perkapita ● Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita

Pusat

Statistik



BAB 3
PERKEMBANGAN AKSES
TERHADAP KEBUTUHAN
DASAR

<https://indonesia.go.id>

3

Perkembangan Akses Terhadap Kebutuhan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Layak)

3.1. Perkembangan Akses Bidang Pendidikan

Pasal 31 dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada bab 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pengetahuan RLS dan HLS tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. APS Kabupaten Sidoarjo, 2017—2021

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7-12)	98.88	100	99.62	99.58	99.59
(13-15)	98.98	100	99.64	99.49	99.13
(16-18)	84.82	86.23	86.93	87.36	87.45

Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan HLS dan RLS Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kelompok umur 16-18 tahun sebesar 0,1 persen dan kelompok umur 7-12 tahun sebesar 0,01 persen. Rendahnya peningkatan APS 16-18 dan 7-12 lebih disebabkan karena pada kelompok umur ini nilainya sudah sangat tinggi (hampir mendekati 100 persen) sehingga ruang untuk

peningkatan sudah sangat sempit. Begitu juga dengan penurunan APS kelompok umur 13-15 sebesar -0,36 persen yang terbilang sangat rendah. Namun, secara agregat peningkatan APS kelompok umur 16-18 yang lebih tinggi dari penurunan kelompok umur lainnya menyebabkan peningkatan terhadap HLS Kabupaten Sidoarjo.

3.2. Perkembangan Akses Bidang Kesehatan

Komponen penting lainnya selain bidang pendidikan adalah bidang kesehatan. Kesehatan sangat berkaitan erat dengan produktivitas seseorang. Semakin tinggi kesadaran seseorang untuk hidup bersih dan sehat maka kesejahteraan hidupnya akan meningkat. Bidang kesehatan sangat berkaitan erat dengan fasilitas kesehatan yang ada di suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan adanya ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah agar pemerintah dapat fokus melakukan pembenahan terhadap pelayanan Kesehatan di suatu daerah yang masih rendah derajat kesehatannya.

Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Sementara itu morbiditas adalah persentase jumlah penduduk yang mengalami keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas terhadap jumlah penduduk. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat Kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan Kesehatan berarti semakin rendah derajat Kesehatan dari masyarakat suatu daerah.

Tabel 3. Angka Kesakitan Kabupaten Sidoarjo 2020—2021

Karakteristik	Angka Kesakitan	Angka Kesakitan
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	11,73	22,76
Perempuan	10,96	22,21
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	10,61	22,78
40 Persen Tengah	10,50	22,58
20 Persen Teratas	14,54	21,69
Kabupaten Sidoarjo	11,35	22,48

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka kesakitan penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 adalah 22,48 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 22,48 persen dari masyarakat Sidoarjo mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas di tahun 2021. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,35 persen. Hal tersebut menunjukkan di tahun 2020 tingkat Kesehatan penduduk Sidoarjo menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan adanya pandemi covid-19 dimana pada Maret 2020 merupakan awal masuknya pandemi covid-19 di wilayah Indonesia dan dampaknya terus meningkat pada tahun 2021. Pada saat itu kasus covid-19 masih mengalami tren peningkatan yang membuat banyak masyarakat yang terpapar sehingga semakin banyak masyarakat Sidoarjo yang mengalami keluhan kesehatan dan aktivitas.

Jika dilihat berdasarkan kategori jenis kelamin, angka kesakitan masyarakat Sidoarjo laki-laki tercatat sebesar 22,76 persen dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 22,21 persen. Sementara itu, berdasarkan kelompok pengeluaran dapat disimpulkan bahwa 20 persen masyarakat Sidoarjo dengan pengeluaran teratas memiliki angka kesakitan yang paling rendah, yaitu sebesar 21,69 persen di tahun 2021. Sedangkan, 40 persen masyarakat berpenghasilan menengah dan 40 persen masyarakat berpenghasilan terbawah masing-masing memiliki angka kesakitan sebesar 22,58 dan 22,78 di tahun 2021.

Faktor Pelayanan Kesehatan

Selain itu, faktor lainnya yang menggambarkan rendah atau tingginya derajat kesehatan di suatu daerah adalah penggunaan jaminan Kesehatan oleh masyarakat suatu daerah. Adanya jaminan Kesehatan akan semakin memudahkan akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Berdasarkan publikasi statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 hingga 2020 kesadaran masyarakat untuk menggunakan jaminan Kesehatan berada dalam tren meningkat, dimana pada tahun 2019 hingga 2021 persentase penduduk Sidoarjo yang menggunakan jaminan Kesehatan untuk berobat jalan masing-masing sebesar 55,41 persen; 59,26 persen, dan 61,34 persen. Tren peningkatan

penggunaan jaminan Kesehatan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Sidoarjo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik semakin tinggi.

Gambar 7. Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan 2017-2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo 2021

Perilaku Kesehatan

Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh pada tingkat Kesehatan masyarakat adalah perilaku sehat. Salah satu indikator perilaku sehat adalah Wanita yang melahirkan di fasilitas Kesehatan dan menggunakan penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan. Wanita yang melahirkan tanpa melalui fasilitas Kesehatan dan tenaga Kesehatan akan beresiko terhadap kesehatan bayi dan ibu bayi. Berdasarkan publikasi statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Sidoarjo 2021, ada 99,91 persen perempuan Sidoarjo pernah kawin berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas Kesehatan dan 100 persen perempuan Sidoarjo pernah kawin berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dengan penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan.

Gambar 8. Indikator Kesehatan Terkait Perilaku Kesehatan Tahun 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo 2021

Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan (angka morbiditas dan mortalitas). Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat Kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar dan akses terhadap air minum layak. Sumber air minum yang layak menurut konsep dan definisi BPS adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant minum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor dan sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Sedangkan, untuk sanitasi layak, diwakili oleh kepemilikan tempat buang air besar sendiri.

Gambar 9. Indikator Kesehatan Terkait Lingkungan Tahun 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo 2021

Pada tahun 2021, terdapat 94,36 persen rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar sendiri. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 92,34 persen. Sementara itu, 5,64 persen rumah tangga yang masih belum memiliki tempat pembuangan air besar sendiri di tahun 2021 biasanya memanfaatkan tempat buang air secara bersama dengan rumah tangga lain, tempat umum, sungai, tanah, dan lain sebagainya.

Faktor Keturunan

Faktor lainnya yang juga dapat berpengaruh terhadap derajat Kesehatan (angka morbiditas dan mortalitas) adalah faktor keturunan. Faktor keturunan memiliki pengaruh sebesar 5 persen terhadap derajat Kesehatan. Meskipun sangat kecil dibandingkan faktor-faktor yang lain, namun faktor ini tidak dapat dikesampingkan mengingat adanya interaksi antar keempat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan.

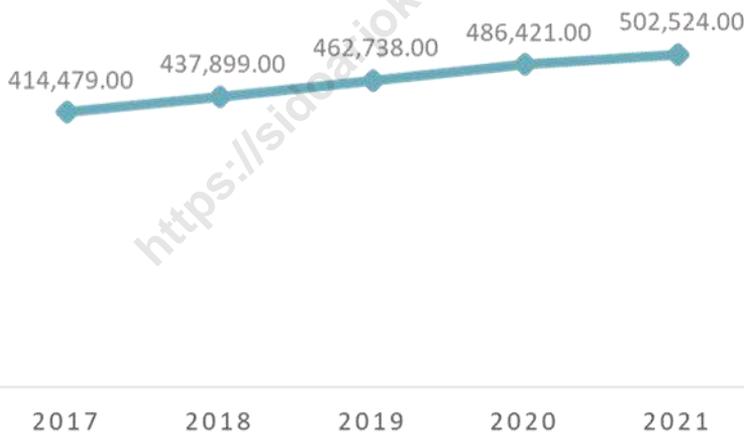
3.3. Perkembangan Akses Standar Hidup Layak

Komponen selanjutnya dalam capaian pembangunan manusia adalah standar hidup layak. Untuk menentukan suatu standar yang dapat dijadikan acuan apakah masyarakat dapat hidup layak, maka diperlukan suatu batas nilai standar hidup layak.

Nilai batas tersebut adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Gambar dibawah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 garis kemiskinan kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 502.524 per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di Kabupaten Sidoarjo adalah Rp 502.524 per kapita per bulan. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 486.421 per kapita per bulan. Selain itu, jika dilihat secara tren dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 garis kemiskinan Kabupaten Sidoarjo berada dalam tren meningkat.

Gambar 10. Garis Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Sementara itu, gambar 11 dibawah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo mengalami tren peningkatan. Tren peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Sidoarjo semakin bertambah dari tahun ke tahun akibat pandemi. Pada

tahun 2021, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar 5,93 persen dimana nilai ini lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,59 persen. Peningkatan tingkat kemiskinan di tahun 2021 masih dipicu oleh pandemi covid-19. Peningkatan harga-harga sebagai efek lanjutan tidak langsung dari pandemi menyebabkan garis kemiskinan meningkat sehingga kelompok masyarakat rentan miskin turun menjadi kelompok masyarakat miskin

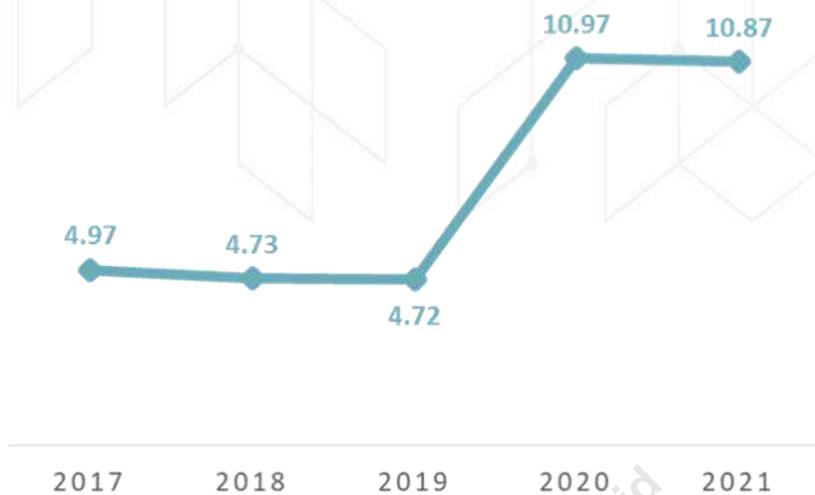
Gambar 11. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Kondisi tingkat kemiskinan yang tinggi akibat pandemi Covid-19 juga masih tergambar dari grafik tingkat pengangguran terbuka (TPT) dibawah. Pada tahun 2021, TPT kabupaten sidoarjo tercatat sebesar 10,87. Angka tersebut tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 10,97 persen. Kondisi tersebut juga semakin memperkuat bukti bahwa dampak pandemi Covid-19 masih menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaannya kemudian berdampak pada tingkat kemiskinan yang meningkat.

Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021

<https://sidoarjokab.bps.go.id>

Lampiran 1. Nilai IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kab/Kota	IPM
Pacitan	68.57
Ponorogo	71.06
Trenggalek	70.06
Tulungagung	73.15
Blitar	71.05
Kediri	72.56
Malang	70.60
Lumajang	66.07
Jember	67.32
Banyuwangi	71.38
Bondowoso	66.59
Situbondo	67.78
Probolinggo	66.26
Pasuruan	68.93
Sidoarjo	80.65
Mojokerto	74.15
Jombang	73.45
Nganjuk	71.97
Madiun	71.88
Magetan	74.15
Ngawi	71.04
Bojonegoro	69.59
Tuban	68.91
Lamongan	73.12
Gresik	76.50
Bangkalan	64.36
Sampang	62.80
Pamekasan	66.40
Sumenep	67.04
Kota Kediri	78.60
Kota Blitar	78.98
Kota Malang	82.04

Lampiran 1. Nilai dan Peringkat IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (lanjutan)

Kab/Kota	IPM
Kota Probolinggo	73.66
Kota Pasuruan	75.62
Kota Mojokerto	78.43
Kota Madiun	81.25
Kota Surabaya	82.31
Kota Batu	76.28

<https://sidoarjo.jokab.bps.go.id>

Lampiran 2. Umur Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Kesehatan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021

Kab/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	Indeks Kesehatan
Pacitan	72.07	0.80
Ponorogo	72.85	0.81
Trenggalek	73.86	0.83
Tulungagung	74.16	0.83
Blitar	73.61	0.82
Kediri	72.65	0.81
Malang	72.61	0.81
Lumajang	70.21	0.77
Jember	69.28	0.76
Banyuwangi	70.72	0.78
Bondowoso	66.89	0.72
Situbondo	69.24	0.76
Probolinggo	67.36	0.73
Pasuruan	70.25	0.77
Sidoarjo	74.06	0.83
Mojokerto	72.59	0.81
Jombang	72.49	0.81
Nganjuk	71.60	0.79
Madiun	71.50	0.79
Magetan	72.65	0.81
Ngawi	72.41	0.81
Bojonegoro	71.72	0.80
Tuban	71.56	0.79
Lamongan	72.49	0.81
Gresik	72.67	0.81
Bangkalan	70.22	0.77
Sampang	68.07	0.74
Pamekasan	67.67	0.73
Sumenep	71.56	0.79
Kota Kediri	74.04	0.83
Kota Blitar	73.86	0.83
Kota Malang	73.36	0.82

Lampiran 2. Umur Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Kesehatan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (lanjutan)

Kab/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	Indeks Kesehatan
Kota Probolinggo	70.35	0.77
Kota Pasuruan	71.60	0.79
Kota Mojokerto	73.39	0.82
Kota Madiun	72.83	0.81
Kota Surabaya	74.18	0.83
Kota Batu	72.65	0.81

<https://sidoarjokab.bps.go.id>

Lampiran 3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Pendidikan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021

Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
Pacitan	7.61	12.65	0.61
Ponorogo	7.55	13.74	0.63
Trenggalek	7.56	12.47	0.60
Tulungagung	8.34	13.32	0.65
Blitar	7.50	12.63	0.60
Kediri	8.08	13.44	0.64
Malang	7.43	13.24	0.62
Lumajang	6.67	11.88	0.55
Jember	6.49	13.43	0.59
Banyuwangi	7.42	13.10	0.61
Bondowoso	5.94	13.29	0.57
Situbondo	6.62	13.16	0.59
Probolinggo	6.12	12.36	0.55
Pasuruan	7.41	12.58	0.60
Sidoarjo	10.72	14.94	0.77
Mojokerto	8.64	12.95	0.65
Jombang	8.55	13.57	0.66
Nganjuk	7.78	12.87	0.62
Madiun	7.82	13.17	0.63
Magetan	8.36	14.04	0.67
Ngawi	7.26	12.83	0.60
Bojonegoro	7.38	12.68	0.60
Tuban	7.18	12.22	0.58
Lamongan	8.04	13.77	0.65
Gresik	9.56	13.77	0.70
Bangkalan	5.96	11.73	0.52
Sampang	4.86	12.38	0.51
Pamekasan	6.70	13.65	0.60
Sumenep	5.92	13.33	0.57
Kota Kediri	10.15	15.27	0.76
Kota Blitar	10.35	14.33	0.74

Lampiran 3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Pendidikan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (lanjutan)

Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
Kota Malang	10.41	15.75	0.78
Kota Probolinggo	8.95	13.60	0.68
Kota Pasuruan	9.33	13.63	0.69
Kota Mojokerto	10.47	14.01	0.74
Kota Madiun	11.37	14.41	0.78
Kota Surabaya	10.50	14.81	0.76
Kota Batu	9.31	14.16	0.70

<https://sidoarjo.kab.bps.go.id>

Lampiran 4. Pengeluaran per Kapita disesuaikan dan Indeks Daya Beli Kab/ Kota di Jawa Timur Tahun 2021

Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Indeks Daya Beli
Pacitan	8,887	0.67
Ponorogo	9,851	0.70
Trenggalek	9,743	0.69
Tulungagung	10,807	0.73
Blitar	10,757	0.72
Kediri	11,127	0.73
Malang	10,163	0.71
Lumajang	9,203	0.68
Jember	9,410	0.68
Banyuwangi	12,217	0.76
Bondowoso	10,690	0.72
Situbondo	9,996	0.70
Probolinggo	10,969	0.73
Pasuruan	10,297	0.71
Sidoarjo	14,578	0.82
Mojokerto	12,844	0.78
Jombang	11,394	0.74
Nganjuk	12,172	0.76
Madiun	11,658	0.75
Magetan	11,833	0.75
Ngawi	11,459	0.74
Bojonegoro	10,221	0.71
Tuban	10,380	0.71
Lamongan	11,510	0.74
Gresik	13,280	0.79
Bangkalan	8,673	0.66
Sampang	8,790	0.66
Pamekasan	8,804	0.66
Sumenep	9,000	0.67
Kota Kediri	12,359	0.77
Kota Blitar	13,816	0.80

Lampiran 4. Pengeluaran per Kapita disesuaikan dan Indeks Daya Beli Kab/ Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (lanjutan)

Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Indeks Daya Beli
Kota Malang	16,663	0.86
Kota Probolinggo	12,245	0.76
Kota Pasuruan	13,354	0.79
Kota Mojokerto	13,610	0.80
Kota Madiun	16,095	0.85
Kota Surabaya	17,862	0.88
Kota Batu	12,887	0.78

<https://sidoarjo.kab.bps.go.id>

DATA

Mencerdaskan Bangsa



Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
Jl. Pahlawan No. 140 Sidoarjo
Telpon: (031)8941744, (031)8946473
Email: bps3515@bps.go.id